

Militerisasi Perbatasan dan Dampaknya Terhadap Stabilitas Kawasan: Studi Kasus Thailand-Kamboja

Muhammad Dipo Alam^{1*}, Aninda Wulan Rohmawati¹, Isha Balqis¹, Yeyen Subandi¹

¹Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Respati Yogyakarta, Indonesia

*Corresponding author : dippopekalongan@gmail.com

Article History:

Received : 21-01-2026

Accepted : 08-02-2026

Keywords: Militerisasi

Perbatasan; Thailand-Kamboja;

Sengketa Wilayah; Stabilitas

Regional; Keamanan Kawasan

ABSTRAK

Militerisasi perbatasan ialah fenomena yang sering muncul dalam sengketa wilayah antarnegara, terlebih di kawasan yang memiliki sejarah konflik yang panjang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak militerisasi perbatasan melalui studi kasus konflik perbatasan Thailand-Kamboja. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa militerisasi perbatasan bukan hanya sebagai instrumen pertahanan negara, tapi juga memiliki potensi memperbesar eskalasi konflik akibat munculnya security dilemma dan kecurigaan antarnegara. Di sisi lain, peningkatan intensitas militer di wilayah yang disengketakan berdampak negatif terhadap stabilitas kawasan Asia Tenggara dan juga menghambat peran ASEAN dalam penyelesaian konflik secara damai. Penelitian ini menyerukan pentingnya pendekatan keamanan non-militer, diplomasi bilateral, serta penguatan peran ASEAN guna menjaga stabilitas dan perdamaian kawasan.

PENDAHULUAN

Garis wilayah perbatasan merupakan bagian strategis dalam hubungan antarnegara karena terhubung langsung dengan kedaulatan, keamanan nasional, dan integritas wilayah. Dalam ilmu hubungan internasional, perbatasan bukan sekadar batas geografis, lebih dari itu sebagai ruang politik dan keamanan yang erat dengan kepentingan negara. Sengketa antar perbatasan sering kali menjadi pemantik konflik karena menyentuh kepentingan vital negara dan simbol identitas nasional. (Rachmat, 2015; Sukma, 2017). Militerisasi di daerah perbatasan muncul sebagai respon negara terhadap ancaman keamanan dan instabilitas dalam hubungan antarnegara. Negara lebih mengandalkan militer sebagai instrumen utama dalam menjaga kedaulatan wilayahnya. Namun, cara ini tidak selalu menghasilkan stabilitas, karena peningkatan kekuatan militer di perbatasan satu negara antar negara lain dapat memicu respon serupa dari negara lain dan kemudian meningkatkan ketegangan bilateral (Widjajanto, 2016; Perwita & Yani, 2018).

Di kawasan Asia Tenggara, konflik perbatasan masih menjadi tantangan bagi stabilitas kawasan walaupun ASEAN terkenal sebagai kawasan yang relatif damai. Di kawasan ini, salah satu konflik yang paling menonjol adalah sengketa perbatasan antara Thailand dan Kamboja yang memperebutkan Kuil Preah Vihear. Sengketa ini tidak hanya bermula oleh persoalan batas wilayah, tetapi juga dari faktor sejarah kolonialisme Prancis dan perbedaan interpretasi hukum internasional (Suryadinata, 2014; Hermawan, 2019). Hasil putusan Mahkamah Internasional (ICJ) mengenai kepemilikan sah Kuil Preah Vihear pada tahun 1962 dan

penegasan kembali pada tahun 2013 secara sah mengakui kedaulatan Kamboja atas wilayah tersebut. Tetapi, putusan tersebut tidak serta merta menyelesaikan konflik tersebut. Ketegangan tetap berlangsung akibat perbedaan kepentingan politik dan keamanan, yang kemudian mendorong kedua negara meningkatkan kehadiran militer di wilayah perbatasan (Hermawan, 2019; Rachmat, 2015). Ketegangan antara Thailand-Kamboja menunjukkan bahwa sengketa wilayah yang belum terselesaikan berkesempatan besar mempengaruhi negara untuk melakukan militerisasi di daerah perbatasan. Pengerahan alutsista dan instalasi fasilitas militer dinilai sebagai cara untuk mempertahankan status kedaulatan dan menunjukkan kekuatan negara. Namun, cara ini justru dapat mempengaruhi eskalasi konflik dan memperburuk hubungan bilateral negara (Perwita, 2016; Sukma, 2017).

Dalam perspektif ASEAN, sengketa perbatasan antara Thailand-Kamboja menjadi tantangan bagi efektivitas mekanisme keamanan kawasan. ASEAN menggunakan prinsip non-intervensi dan penyelesaian konflik secara non-militer melalui dialog dan sistem konsensus. Tetapi, prinsip ini seringkali menghadapi hambatan ketika konflik melibatkan isu kedaulatan dan kepentingan nasional yang rawan, sehingga ini kemudian mempengaruhi respon ASEAN yang menjadi normatif dan kurang efektif (Suryadinata, 2014; Hermawan, 2019). Militerisasi perbatasan juga sangat dipengaruhi oleh gejolak politik dalam negeri masing-masing negara. Di Thailand, andil militer dalam politik nasional turut mempengaruhi kebijakan di wilayah perbatasan. Di sisi lain, bagi Kamboja, sengketa Preah Vihear bukan sekadar perebutan kuil, melainkan sebagai simbolik yang kuat dalam pembentukan identitas nasional dan sebagai legitimasi politik domestik. Faktor-faktor ini memperkuat kecenderungan penggunaan militer dalam mengelola konflik perbatasan (Widjajanto, 2016; Rachmat, 2015). Dampak dari peningkatan aktivitas militer di perbatasan tidak hanya dirasakan oleh pemerintah, tetapi juga oleh masyarakat yang tinggal di sana. Kegiatan militer yang sering terjadi dapat mengganggu kegiatan sehari-hari, menimbulkan ketakutan, dan membahayakan keselamatan warga. Hal ini menunjukkan bahwa konflik perbatasan memiliki dampak negatif yang besar, tidak hanya pada keamanan negara tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat setempat (Perwita dan Yani, 2018; Sukma, 2017).

Beberapa penelitian di Indonesia yang membahas sengketa antara Thailand dan Kamboja menggunakan perspektif hukum internasional, diplomasi dan peran ASEAN. Akan tetapi, penelitian yang secara eksplisit memposisikan militerisasi perbatasan sebagai topik utama dan menghubungkannya dengan stabilitas keamanan kawasan masih cukup terbatas. Beberapa penelitian lebih fokus pada faktor legal dan diplomatik, sehingga dinamika keamanan regional dari militerisasi belum dikaji secara mendalam. Berdasarkan pada situasi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk melengkapi celah penelitian dengan menganalisis dinamika militerisasi perbatasan antara Thailand dan Kamboja serta juga dampaknya kepada stabilitas kawasan Asia Tenggara. Penelitian ini mengungkapkan militerisasi sebagai suatu respon yang tidak hanya berkaitan dengan keamanan nasional, tapi juga berpengaruh terhadap dinamika kawasan secara umum.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk dan dinamika militerisasi perbatasan Thailand-Kamboja serta bagaimana dampaknya terhadap stabilitas kawasan Asia Tenggara. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis aspek penguat militerisasi perbatasan, dampaknya terhadap hubungan bilateral dan kawasan, juga peran mekanisme kawasan dalam merespon sengketa perbatasan tersebut. Pada dasarnya penelitian

ini diharapkan dapat menambah riset keamanan kawasan dalam studi hubungan internasional di Indonesia. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan dalam menyusun strategi manajemen konflik perbatasan yang lebih mengutamakan pendekatan dan kerjasama regional demi menjaga stabilitas kawasan Asia Tenggara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus untuk menganalisis peristiwa militerisasi perbatasan Thailand-Kamboja beserta dampaknya terhadap stabilitas keamanan kawasan Asia Tenggara. Pendekatan kualitatif lebih relevan karena penelitian ini berupaya memahami dinamika keamanan, dan pola interaksi antarnegara dalam konteks kawasan, bukan untuk menguji hubungan sebab-akibat secara kuantitatif. Studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti menelaah suatu konflik perbatasan secara mendetail dengan mempertimbangkan sisi historis, politik, dan keamanan yang meliputinya (Creswell, 2016). Metode penelitian ini dilandaskan pada *Regional Security Complex Theory* (RSCT) yang dikemukakan oleh Barry Buzan dan Ole Wæver. Teori ini menyatakan bahwa isu keamanan cenderung terbatas wilayah secara geografis, di mana ancaman dan pandangan keamanan suatu negara saling berkaitan erat dengan negara-negara di sekitarnya. RSCT digunakan sebagai cara pandang analitis untuk memahami dinamika konflik dan militerisasi perbatasan Thailand dan Kamboja tidak hanya berdampak pada hubungan bilateral, tetapi juga membentuk dinamika keamanan kawasan Asia Tenggara secara lebih luas. Dengan metode ini stabilitas kawasan dapat dipahami sebagai hasil dari struktur interaksi keamanan antarnegara yang berdekatan secara geografis (Buzan & Wæver, 2003).

Penelitian ini menggunakan deskriptif-analitis yang menggambarkan secara terstruktur proses militerisasi yang terjadi di wilayah perbatasan Thailand dan Kamboja dan juga menganalisis dampaknya terhadap stabilitas keamanan kawasan. Unit analisis dalam penelitian ini adalah kebijakan militerisasi perbatasan serta struktur interaksi keamanan antara Thailand dan Kamboja dalam konteks kawasan Asia Tenggara. Analisis diutamakan pada bagaimana peningkatan peran militer, eskalasi ketegangan perbatasan, juga respon keamanan kedua negara membentuk persepsi ancaman yang berpotensi mempengaruhi negara lain di kawasan tersebut dalam struktur keamanan ASEAN (Bungin, 2017). Data acuan yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang didapat dengan cara studi pustaka. Data termasuk jurnal ilmiah, karangan akademik, laporan Mahkamah Internasional (ICJ) dan ASEAN yang berhubungan dengan sengketa perbatasan Thailand-Kamboja, stabilitas Asia Tenggara, dan teori keamanan kawasan. Data yang digunakan mencakup periode dinamika konflik dan militerisasi perbatasan Thailand-Kamboja dalam dua dekade terakhir, sehingga memudahkan peneliti menangkap perkembangan pola keamanan kawasan secara lebih komprehensif. Proses pengumpulan data dilakukan pencarian sumber literatur dengan memilah dengan ketat berbagai sumber yang memiliki hubungan langsung dengan topik utama penelitian. Referensi yang digunakan diprioritaskan berasal dari karya akademik yang melalui berbagai proses analisis ahli dan juga publikasi lembaga yang memiliki wewenang di bidang keamanan regional. Tahap ini bermaksud memastikan bahwa data yang dianalisis dipastikan kredibel secara faktual serta memiliki landasan teori yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Dalam penelitian ini, metode kualitatif digunakan untuk menganalisis data, yang melibatkan analisis isi data. Data yang dikumpulkan kemudian disusun menurut subjek

penelitian. Dengan mengaitkan temuan fakta dengan konsep RSCT, peneliti dapat memahami makna dari kebijakan dan respons militer masing-masing negara. Pendekatan ini juga membantu peneliti menjelaskan bagaimana sengketa perbatasan Thailand-Kamboja memengaruhi stabilitas dan instabilitas keamanan di Asia Tenggara. Penelitian ini menggunakan pengecekan lintas sumber dengan membandingkan data dari berbagai literatur dan dokumen. Metode ini digunakan untuk mengurangi kesalahan dan memastikan bahwa hasil penelitian konsisten. Penulis berharap hasil penelitian ini akan membantu masalah militerisasi perbatasan Thailand-Kamboja dalam hal keamanan Asia Tenggara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konflik yang terjadi antara Thailand dan Kamboja sudah berlangsung sangat lama, konflik ini bermula dari sengketa garis wilayah perbatasan dan kepemilikan Kuil Preah Vihear. Baik Thailand maupun Kamboja saling mengakui kedudukan atas wilayah dan daerah yang disengketakan. Di sisi Kamboja, klaim dilandaskan oleh peta peninggalan kolonialisme Prancis yang mana dalam peta ini disertakan wilayah Kuil Preah Vihear kedalam teritorial kolonialisme Prancis atas Kamboja yang saat itu masih bentuk kerajaan Khmer. Sedangkan di sisi Thailand, klaim muncul atas dasar perbedaan penafsiran perjanjian perbatasan kolonial dan perbedaan pandang prinsip watershed dalam delimitasi wilayah. Sengketa ini kemudian memunculkan konflik yang terjadi di antara perbatasan Thailand dan Kamboja, ketegangan yang ada mengharuskan militer melakukan respon dengan militerisasi daerah perbatasan yang mana cara ini sama-sama diimplementasikan oleh Thailand dan Kamboja. Fenomena militerisasi perbatasan yang terjadi di antara Thailand dan Kamboja merupakan respon keamanan yang tidak bisa dipisahkan dengan faktor historis dan struktural kawasan Asia Tenggara. Kuil Preah Vihear yang disengketakan merupakan bentuk dari konflik teritorial dan juga menggambarkan bagaimana isu kedaulatan, identitas, dan legitimasi negara saling berkaitan dalam aspek keamanan kontemporer. Walaupun Mahkamah Internasional (ICJ) telah mengeluarkan putusan yang sah secara hukum, tetapi gejolak politik domestik dan pandangan terhadap ancaman yang berkembang di kedua negara mengakibatkan konflik yang sudah diwariskan sejak dahulu tetap hidup berupa ketegangan militer di wilayah perbatasan (Suryadinata, 2017).

Perspektif *Regional Security Complex Theory* (RSCT) memandang konflik antara Thailand dan Kamboja menunjukkan ciri utama keamanan kawasan, yaitu adanya hubungan erat antara ancaman keamanan suatu negara dengan lingkungan geografis di sekitarnya. Buzan dan Wæver (2003) menyatakan bahwa keamanan bersifat relasional dan terlokalisasi, karenanya konflik yang lahir di antara negara yang saling bertetangga hampir selalu memiliki dampak terhadap stabilitas kawasan. Berdasar pada konteks ini, militerisasi perbatasan Thailand dan Kamboja tidak dapat disimpulkan sebagai permasalahan bilateral yang terisolasi, tetapi sebagai bagian dari dinamika keamanan Asia Tenggara yang lebih luas. Militerisasi perbatasan menggambarkan terjadinya *security dilemma* dalam kerangka regional. Respon Thailand dalam memperkuat kehadiran militernya di wilayah yang disengketakan diartikan oleh Kamboja sebagai ancaman serius terhadap kedaulatan nasionalnya, hingga kemudian mengakibatkan respon militer yang serupa. Metode ini membuktikan bahwa tindakan defensif suatu negara dapat diartikan secara ofensif oleh negara lain, dan pada akhirnya menciptakan ketegangan di antara dua negara. Dengan menggunakan RSCT, dinamika tersebut mendukung interdependensi keamanan negatif antarnegara kawasan, dalam artian peningkatan keamanan

satu negara justru meningkatkan ancaman pada negara lain (Buzan, 1991). Lebih dari itu, militerisasi perbatasan Thailand-Kamboja tidak dapat dipisahkan dari pengaruh politik domestik masing-masing negara. Thailand dipengaruhi kuat oleh peran militer sebagai aktor politik dalam negeri yang dominan sehingga menjadikan isu keamanan perbatasan dapat dimanfaatkan sebagai instrumen legitimasi dan konsolidasi kekuasaan. Sedangkan di Kamboja, konflik perbatasan digunakan untuk memupuk rasa nasionalisme dan dukungan masyarakat terhadap pemerintah. Pengaruh dalam negeri ini menguatkan asumsi bahwa dinamika keamanan kawasan tidak terbatas oleh struktur regional, melainkan juga oleh hubungan antara politik dalam negeri dan kepentingan keamanan negara, sebuah aspek yang tetap relevan dalam konsep RSCT kontemporer (Acharya, 2014).

Dampak nyata militerisasi perbatasan terhadap stabilitas kawasan Asia Tenggara menjadi semakin konkret ketika dikaitkan dengan karakteristik kompleks keamanan regional di kawasan ini. Asia Tenggara sendiri sering disimpulkan sebagai pluralistic security community yang belum sepenuhnya terkonsolidasi. Walaupun konflik bersenjata berskala besar jarang terjadi, kemungkinan ketegangan antarnegara tetap tinggi dikarenakan lemahnya mekanisme penanganan konflik keamanan tradisional. Konsep ini sekaligus menjawab penyebab konflik Thailand-Kamboja mengalami keterbatasan reaksi kawasan dalam mencegah eskalasi konflik bersenjata antarnegara anggota (Acharya, 2018). Respon ASEAN dalam menangani sengketa Thailand-Kamboja menyatakan dilema institusional yang dihadapi oleh organisasi kawasan tersebut. Sifat non-intervensi dan pengambilan keputusan berlandaskan konsensus yang kemudian menjadi hambatan bagi ASEAN dalam bertindak secara tegas dalam isu keamanan tradisional. Pandangan RSCT mengungkapkan bahwa kondisi ini menunjukkan Asia Tenggara membentuk suatu kompleks keamanan regional, namun institusionalisasi keamanan kolektifnya masih lemah, Ini mengakibatkan konflik bilateral tetap memiliki potensi besar untuk mengganggu stabilitas kawasan tanpa mekanisme regional yang efisien untuk menyelesaikan konflik (Leifer, 1999).

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis *Regional Security Complex Theory* (RSCT), penelitian ini menyimpulkan bahwa militerisasi perbatasan antara Thailand dan Kamboja mencerminkan dinamika *security dilemma* regional, di mana upaya pertahanan negara justru berkontribusi pada peningkatan ketegangan dan instabilitas keamanan di Asia Tenggara. Konflik perbatasan ini menunjukkan bahwa sengketa bilateral tidak bersifat terisolasi, melainkan memiliki dampak kawasan yang lebih luas akibat keterkaitan struktur keamanan regional. Perkembangan mutakhir di wilayah perbatasan mengindikasikan bahwa peningkatan aktivitas militer terus berpotensi mengganggu stabilitas kawasan, sementara peran ASEAN masih terbatas oleh prinsip non-intervensi dan mekanisme konsensus. Penelitian ini berkontribusi pada kajian keamanan regional di Indonesia dengan memperkaya pemahaman mengenai militerisasi perbatasan dalam kerangka RSCT. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan dialog bilateral, penurunan kehadiran militer secara bertahap sesuai putusan ICJ, serta pembaruan peran ASEAN melalui mekanisme pengawasan lapangan guna mencegah eskalasi konflik dan menjaga stabilitas kawasan Asia Tenggara.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Acharya, A. (2014). Constructing a security community in Southeast Asia: ASEAN and the problem of regional order. *Asian Security*, 10(3), 203–220. <https://doi.org/10.1080/14799855.2014.954701>
- [2] Acharya, A. (2018). *The end of American world order (2nd ed.)*. Polity Press.
- [3] Acharya, A. (2018). The myth of the “ASEAN way”? Explaining the evolution of regional security cooperation in Southeast Asia. *Asian Security*, 14(2), 1–20. <https://doi.org/10.1080/14799855.2017.1353748>
- [4] Anwar, D. F. (2018). *Indonesia and ASEAN: Fifty years of regional diplomacy*. Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS).
- [5] Bungin, B. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif: Aktualisasi metodologis ke arah ragam varian kontemporer*. Rajawali Pers.
- [6] Buzan, B. (1991). *People, states and fear: An agenda for international security studies in the post-Cold War era (2nd ed.)*. Harvester Wheatsheaf.
- [7] Buzan, B., & Wæver, O. (2003). *Regions and powers: The structure of international security*. Cambridge University Press. [<https://doi.org/10.1017/CBO9780511491252>]. (<https://doi.org/10.1017/CBO9780511491252>)
- [8] Buzan, B., & Wæver, O. (2003). Regions and powers: The structure of international security. *Cambridge Review of International Affairs*, 17(3), 437–442. <https://doi.org/10.1080/0955757042000290530>
- [9] Collins, A. (2019). *Contemporary security studies (5th ed.)*. Oxford University Press.
- [10] Creswell, J. W. (2016). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.)*. SAGE Publications.
- [11] Hermawan, Y. P. (2019). Border dispute and regional security: The Thailand–Cambodia conflict over Preah Vihear Temple. *Journal of ASEAN Studies*, 7(2), 133–149. <https://doi.org/10.21512/jas.v7i2.5694>
- [12] Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif (Edisi revisi)*. PT Remaja Rosdakarya.
- [13] Nazir, M. (2014). *Metode penelitian*. Ghalia Indonesia.
- [14] Perwita, A. A. B., & Yani, Y. M. (2018). Security dilemma and border conflict in Southeast Asia: Lessons from the Thailand–Cambodia dispute. *Indonesian Journal of International Relations*, 2(1), 45–60.
- [15] Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- [16] Sukma, R. (2010). *ASEAN and regional security*. Indonesian Centre for Strategic and International Studies (CSIS).
- [17] Sukma, R. (2014). *Indonesia and the emerging regional order in East Asia*. Indonesian Centre for Strategic and International Studies (CSIS).
- [18] Suryadinata, L. (2017). *Southeast Asian affairs: Regional trends and national developments*. Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS).